

**PENANGGULANGAN KORUPSI BERBASIS
PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI KABUPATEN SIDOARJO**

Hazim Hamid

Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Telpn: 081578820031, email: mizakh@yahoo.com

ABSTRACT

This research purpose to study about community participation in the prevention of corruption in Urban poverty Project (PNPM Mandiri Perkotaan) in Sidoarjo and identify patterns of corruption and participatory measures to resolve it. The method used is descriptive qualitative. Purposive sampling is used to determine the location of the research, Sidoarjo and Taman district. Informants focused on the perpetrators and beneficiaries of PNPM. Technical extracting data from interviews, observations, and document study.

To analyze the data, using several theoretical approaches participation: Mikkelsen split participation at the initiative of the people themselves and coercive participation; Pretty classifies participation into *Passive Participation*; *Participation in information giving*; *Participation by consultation*; *Participation for material benefits*; *Functional participation*; *Interactive participation*; *Self-mobilisation*. Keit Davis classifies a participation in the psychological participation, physical Participation, physical and psychological participation, participation with skill, material participation, material participation. While the level of participation by Sherry R Arnstein consists of: Manipulation, Therapy, Informing, Consultation, placation, partnership, delegation of power, and citizen control.

The results, public participation in order to control corruption can be seen in three stages: a) the planning stage, is still a force, Consulting participation (Pretty); shaped in the form of psychological participation; physical Participation, participation with skill (Davis); the level of participation at the Partnership level (Arstein). b) the implementation stage, the administration is more dominant on the typology of passive participation (Pretty), including participation levels manipulation (Arstein). Instead of the work, in the category of self-mobilization participation (Pretty), levels reached delegated power (Arstein), and the form of participation is physical and psychological participation; participation with skill. c) monitoring and evaluation stage, categorized compulsion participation (Mikkelsen), typology Consulting (Pretty), levels reaching delegation of power (Arstein). While its shape in the form of physical and psychological participation (Davis).

Keywords: *Participation, Corruption, PNPM Mandiri Perkotaan.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam penanggulangan korupsi pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan difokuskan pada pelaku dan penerima manfaat dari PNPM baik di kawasan urban. Penentuan lokasi menggunakan *purposive sampling* yakni di Kecamatan Sidoarjo dan Taman. Informan difokuskan pada pelaku dan penerima manfaat PNPM. Teknis penggalan datanya berasal dari interview, observasi, dan studi dokumen.

Untuk menganalisis data, menggunakan beberapa pendekatan teori partisipasi: Mikkelsen, membagi partisipasi atas inisiatif masyarakat sendiri dan partisipasi yang bersifat memaksa; Pretty mengelompokkan tipologi partisipasi menjadi *Passive Participation*; *Participation in information*

giving; Participation by consultation; Participation for material benefits; Functional participation; Interactive participation; Self-mobilisation. Sedangkan Keit Davis; Keit Davis mengklasifikasikan partisipasi dalam bentuk **Partisipasi berupa pikiran, Partisipasi yang berupa tenaga, Partisipasi yang berupa tenaga dan pikiran, Partisipasi yang berupa keahlian, Partisipasi yang berupa barang, Partisipasi yang berupa uang.** Sementara tingkatan partisipasi menurut Sherry R Arnstein terdiri dari: Manipulasi, Terapi, Informasi, Konsultasi, Penentrangan, Kemitraan, Pendelegasian kekuasaan, dan Pengendalian warga.

Hasil Penelitian, pertama, partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan korupsi bisa dilihat dari tiga tahap: a) tahap perencanaan, masih bersifat memaksa, tipologinya termasuk Partisipasi Konsultasi, bentuknya **berupa pikiran; tenaga dan pikiran; serta barang, tingkatan partisipasinya pada level Kemitraan.** b), Tahap pelaksanaan, secara administrasi lebih dominan pada tipologi partisipasi pasif, tingkatannya termasuk partisipasi manipulation. Sebaliknya dari sisi pekerjaan, tipologi masuk kategori partisipasi mobilisasi swadaya, levelnya mencapai delegated power, sedangkan bentuk partisipasinya berupa **tenaga dan pikiran; barang; serta uang.** c), Tahap monitoring dan evaluasi, masuk kategori partisipasi keterpaksaan, tipologinya Partisipasi Konsultasi, levelnya mencapai pendelegasian kekuasaan. Sedangkan bentuknya **berupa tenaga dan pikiran.**

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi persoalan berat bagi Bangsa Indonesia. Hasil Survei yang dilansir tanggal 13 Juni 2011 di Washington DC oleh The World Justice Project (WJP) menempatkan Indonesia pada posisi ke-47 dari 66 negara terkorup secara global. Sementara di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik, Indonesia berada di urutan ke-12 dari 13 negara. (Haluan Kepri: 2011).

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program pembangunan di Indonesia yang memiliki dua strategi penanggulangan korupsi secara sekaligus. Pertama, secara struktural pada tingkat Pusat melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Instansi Penanggung jawab program; kedua melibatkan partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat program dan juga sebagai satuan pelaksana sub proyek/kegiatan. (DPU: 2007). Strategi penanggulangan korupsi kedua yang merupakan pendekatan kultural berbasis partisipasi masyarakat ini menarik dilakukan kajian.

Atas dasar itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam sehingga diharapkan bisa mendeskripsikan tentang model partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan korupsi pada PNPMM Mandiri Perkotaan di Sidoarjo.

Untuk menganalisis data, menggunakan beberapa pendekatan teori partisipasi. Mikkelsen (2006), membagi dua pendekatan dalam hal partisipasi, yaitu: (1) partisipasi datang dari inisiatif masyarakat sendiri, merupakan tujuan dalam proses demokrasi. (2) partisipasi dengan motivasi positif yang bersifat memaksa. Tingkat partisipasi masyarakat menurut Arnstein (1969) dapat ditunjukkan oleh terjadinya pembagian kekuasaan yang adil (*redistribution of power*) antara penyedia kegiatan dan kelompok masyarakat penerima kegiatan. Adapun tingkatannya secara berurutan adalah: *Manipulation; Therapy; Informing; Consultation; Placation; Partnership; Delegated power; Citizen control.* Dua tangga pertama (*Manipulation; Therapy*) dikategorikan sebagai *Nonparticipation*, Tiga tangga berikut (*Informing; Consultation; Placation*) disebut sebagai *Tokenism*, yaitu bentuk partisipasi didasarkan atas dorongan. Sedangkan Tiga tangga terakhir (*Partnership; Delegated power; Citizen control*) dikategorikan sebagai *Citizen Power*. Dan ini merupakan bentuk partisipasi yang sesungguhnya, karena masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Pretty (1995) mengklasifikasikan parti-

sipasi menjadi tujuh: *Passive Participation; Participation in information giving; Participation by consultation; Participation for material benefits; Functional participation; Interactive participation; Self-mobilisation.* Sedangkan Keit Davis (1995) membagi bentuk partisipasi dalam beberapa jenis: *psychological participation; physical Participation; physical and psychological participation; participation with skill; material participation; money participation.*

Beberapa kajian sebelumnya yang relevan dengan topik ini adalah: 1) Melly Septiani (2010), Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam PNPMM Mandiri Perkotaan, "Studi kasus di Tlogomas Lowokwaru Kota Malang". Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat berada pada tingkat *placation* untuk indikator prakarsa, *informing* untuk indikator pembiayaan, *delegated power* untuk indikator pengambilan keputusan, *citizen power* untuk indikator kemampuan memobilisasi tenaga dan *partnership* untuk indikator kemampuan menyelesaikan masalah. 2) Yoni Yulianti (2010), Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan PNPMM Mandiri Perkotaan di Kota Solok. Hasil penelitian, partisipasi masyarakat diberikan dalam bentuk sumbangan pikiran berupa usulan, saran maupun kritik. Sumbangan tenaga diberikan dengan frekuensi terbanyak yaitu 52,7 %. Selain itu juga ada dalam bentuk material dan uang. 3) Faizal Saleh Muhammad (2006), Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Hasil penelitian, terdapat tiga konsep partisipasi masyarakat. partisipasi politik, partisipasi social dan partisipasi warga.

Penelitian ini difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan korupsi pada PNPMM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian adalah PNPMM Mandiri Perkotaan di Sidoarjo yang difokuskan pada kawasan urban. Klasifikasi

kawasan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik partisipasi masyarakat secara spesifik untuk kategori masyarakat heterogen. Fokus penelitian di dua Kecamatan, Kecamatan Sidoarjo (Kelurahan Cemengkalang, Bluru Kidul) dan Kecamatan Taman (Desa Wage, Desa Kedungturi).

Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data skunder. Jenis data primer diperoleh secara langsung dari sumber melalui: Pertama, wawancara secara bebas terpimpin kepada pelaku PNPMM Mandiri Perkotaan di tingkat Desa/Kelurahan; Penerima manfaat, Relawan, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Pimpinan Kolektif BKM, Kepala Desa, fasilitator; Kedua, observasi secara nonpartisipan, yang dimaksudkan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan PNPMM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi tiga kegiatan utama, yaitu; infrastruktur (lingkungan), sosial dan ekonomi; Ketiga, Studi Dokumen yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum PNPMM Mandiri Perkotaan di Sidoarjo, antara lain diperoleh dari; dokumen pencairan, dokumen pemanfaatan, Proposal pelaksanaan kegiatan, pelaporan dana kegiatan serta dokumen lain yang mendukung.

Teknik Analisis yang digunakan adalah analisis diskriptif kualitatif. Melalui analisis data penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran secara menyeluruh tentang partisipasi masyarakat dalam penanggulangan korupsi pada PNPMM Mandiri Perkotaan di Sidoarjo. Gambaran hasil penelitian tersebut kemudian ditelaah, dikaji dan disimpulkan berdasarkan tujuan penelitian dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif. Adapun langkah-langkah teknik analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, Pengumpulan data, Reduksi data, Display data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

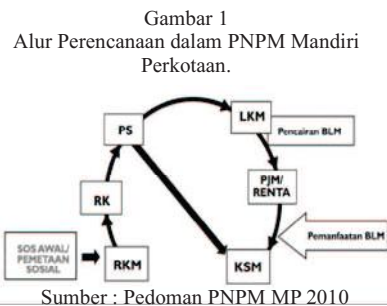
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan korupsi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo, bisa

dilihat dari beberapa rangkaian. Slamet (1993) membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan: Tahap pengambilan keputusan (perencanaan), yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat; Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan; Tahap monitoring dan evaluasi, partisipasi masyarakat pada tahap ini sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

a. Partisipasi saat Perencanaan.

Perencanaan merupakan pondasi awal untuk melakukan pengendalian dalam pengambilan keputusan agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan. PNPMM Mandiri Perkotaan memberikan perhatian yang ketat pada tahapan ini. Usulan kegiatan yang akan mendapatkan alokasi pendanaan dilakukan perencanaan dengan tahapan yang sangat detail dan mensyaratkan partisipasi masyarakat di mulai dari tingkat terendah (RT/RW). Tahapannya meliputi: Sosialisasi dan rembug kesiapan masyarakat (Soswal-RKM); Refleksi Kemiskinan (RK); Pemetaan swadaya (PS); Pembangunan Kelembagaan Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat, penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis); penetapan dalam Rencana Tahunan (Renta) hingga penentuan dalam prioritas usulan kegiatan (Dep. PU, 2007). Lebih detail mengenai alur perencanaannya, dapat dilihat dari bagan berikut:



Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik partisipasi masyarakat pada saat perencanaan di PNPMM Mandiri Perkotaan Sidoarjo secara umum, jika pendekatan Mikkelsen (2006), digunakan, maka partisipasinya bersifat memaksa. Jika menggunakan teorinya Pretty, masuk tipologi partisipasi Konsultasi. Artinya Masyarakat berpartisipasi melalui konsultasi dengan pihak luar yakni tim Konsultasi yang mengawal perjalanan perencanaan program. Mereka bergerak atas bimbingan dan dorongan dari Fasilitator pendamping di masing-masing kelurahan/Desa.

Tabel 1
Tipologi dan karakteristik Partisipasi

Tipology	Cara cteristic
Passive Participation	People participate by being told what is going to happen or has already happened. It is a unilateral announcement by an administration or project management without any listening to people's responses.
Participation in information giving	The information being shared belongs only to external professionals. People participate by answering questions posed by extractive researchers using questionnaire surveys or such similar approaches. People do not have the opportunity to influence proceedings, as the findings of the research are neither shared nor checked for accuracy.
Participation by consultation	People participate by being consulted, and external agents listen to views. These external agents define both problems and solutions, and may modify these in the light of people's responses. Such a consultative process does not concede any share in decision making, and professionals are under no obligation to take on board people's views.
Participation for material benefits	People participate by providing resources such as labour, in return for food, cash or other material incentives. Much on farm research falls in this category, as farmers provide the fields but are not involved in experimentation or the process of learning. It is very common to see this called participation yet people have no stake in prolonging activities when incentives end.
Functional participation	People participate by forming groups to meet predetermined objectives related to the project, which can involve the development or promotion of externally initiated social organisation. Such involvement tends not to be at early stages of project cycles or planning, but rather

Tipology	Characteristic
	after major decisions have already been made. These institutions tend to be dependent on external initiators and facilitators, but may become self-dependent.
Interactive participation	People participate in joint analysis, which leads to action plans and the formation of new local institutions or the strengthening of existing ones. It tends to involve interdisciplinary methodologies that seek multiple objectives and make use of systematic and structured learning processes. These groups take control/ownership over local decisions, and so people have a stake in maintaining structures or practices.
Self-mobilisation	People participate by taking initiatives independent of external institutions to change systems. Such self-initiated mobilisation and collective action may or may not challenge existing inequitable distributions of wealth and power.

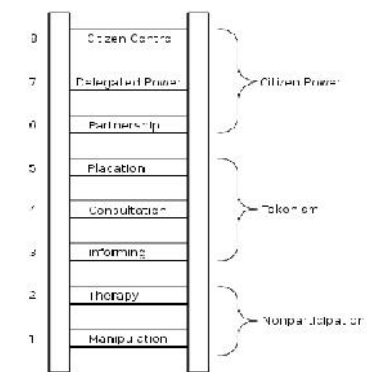
Sumber: Pretty (1995)

Adapun bentuk partisipasinya, merujuk pada Keit Davis dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

- 1) Partisipasi berupa pikiran (psychological participation). Wujudnya adalah dengan mengikuti serangkaian tahapan rembug mulai dari Soswal-RKM, RK, PS, Pembangunan Kelembagaan BKM dan penyusunan PJM baik ditingkat basis maupun Desa.
- 2) Partisipasi yang berupa tenaga dan pikiran (physical and psychological participation). Untuk kategori ini, selain mereka secara aktif ikut dalam rangkaian perencanaan, mereka juga berpartisipasi untuk memobilisasi partisipan lain dengan memberikan undangan dan lain-lain. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam bentuk demikian tidak banyak, tetapi biasanya mereka akan menjadi tokoh kunci perjalan PNPMM Mandiri Perkotaan di Desa/ Kelurahan tersebut. Mereka ini biasanya masuk kategori relawan.
- 3) Partisipasi dalam bentuk barang (*material participation*), partisipasi dengan member-kan barang yang dimilikinya untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. Antara lain

meminjamkan lapotop, computer, memberikan konsumsi kegiatan, dan lain-lain untuk menunjang kelancaran kegiatan.

Dilihat relasinya dengan Pemerintah, model partisipasi masyarakat pada perencanaan ini apabila dipotret dengan teori partisipasi Arstein, mencapai level ke enam, yaitu Kemitraan (partnership). Karena pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Ada pembagian kerja antara antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Di dalam sistem PNPMM Mandiri Perkotaan, semua perencanaan diberikan kesempatan pada masyarakat dengan didampingi oleh fasilitator, sementara Pemerintah bertanggung jawab memfasilitasi untuk kelancaran proses. Berikut ini adalah anak tangga partisipasi menurut Arnstein.



Sumber: Artein: 1969.

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan yang dimaksud di sini adalah pemanfaatan dana untuk membiayai kegiatan berdasarkan alokasi yang sudah direncanakan, baik kegiatan yang bersifat Lingkungan, ekonomi maupun sosial. Pelaksanaan kegiatan di PNPMM

Mandiri Perkotaan adalah masyarakat sendiri yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kelompok ini bertanggung jawab untuk menyusun usulan kegiatan; Mengelola dana yang diperolehnya untuk mendanai kegiatan/pembangunan yang diusulkan; mempertanggungjawabkan laporan kegiatan dan keuangan yang didanai kepada BKM dan juga ke masyarakat di wilayahnya. (Dep. PU, 2010).

Agar masyarakat melalui KSM bisa mendapatkan kucuran dana PNPMM Mandiri Perkotaan melalui BKM harus memenuhi prosedur: KSM telah mendaftar ke BKM dan dinyatakan layak; Adanya usulan kegiatan (proposal) oleh KSM; Usulan dari KSM telah masuk pada prioritas kegiatan atau Rencana Penggunaan Dana (RPD) BKM; Apabila kegiatan bersifat infrastruktur, sebelum memanfaatkan dana, dilakukan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (MP2K) difasilitasi oleh BKM; Proses pencairan dana dilakukan secara langsung 100% untuk KSM ekonomi dan sosial. Sedangkan untuk kegiatan lingkungan dilakukan secara bertahap 30%, 60%, 10%. (Dep. PU 2010). Tahapan ini dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian di masyarakat. Pelimpahan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat secara langsung merupakan salah satu bentuk penanggulangan korupsi. Karena masyarakat diberikan kepercayaan untuk mengelola pendanaan dan kegiatannya sendiri. Apalagi sistem pembiayaan, menyaratkan adanya swadaya dan jaminan bahwa biaya pengerjaan kegiatan lebih murah 25% dari harga umum.

Bentuk partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan, bisa dilihat dari dua hal: secara administratif; meliputi proposal kegiatan dan laporan kegiatan; dan secara pekerjaan, meliputi serangkaian aktifitas pelaksanaan kegiatan secara langsung sesuai dengan jenis kegiatannya. Secara administratif, temuan di lapangan menunjukkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan PNPMM; pertama, KSM merupakan penunjuk dari

BKM untuk syarat pencairan, bukan atas inisiatif dari masyarakat; Kedua, KSM tidak mengerjakan administrasi tapi dihandle oleh BKM. Hal ini terjadi di beberapa KSM. Menurut sejumlah pengurus BKM, sulitnya administrasi menjadi alasan bagi KSM untuk tidak mengerjakan, sehingga mereka harus menyerahkan ke BKM untuk mengerjakannya. Melihat kondisi partisipasi ini, bila dilihat menurut Pretty, termasuk kategorisasi partisipasi pasif, sedangkan bila dipotret berdasarkan tingkatan partisipasi menurut Arstein, partisipasi masyarakat (KSM) berada pada tingkatan manipulation, artinya belum ada partisipasi masyarakat (nonparticipation).

Apabila dilihat dari sisi pelaksanaan pekerjaan, terutama dalam kegiatan infrastruktur, tipologi partisipasi mobilisasi swadaya. Masyarakat berpartisipasi dengan cara mengambil inisiatif dan tidak terikat dalam menentukan masa depan, di mana pihak luar hanya diminta bantuan dan nasihat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. Tingkatan partisipasi pada level *delegated power*. Sedangkan bentuk partisipasinya (Davis), dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis:

- Partisipasi yang berupa tenaga (*physical Participation*); Realisasi dari partisipasi ini adalah masyarakat terlibat langsung dalam pekerjaan tanpa mendapatkan imbalan. Biasanya bersifat gotong royong untuk melakukan pekerjaan yang tidak membutuhkan skill khusus. pada waktu-waktu tertentu; malam hari atau hari libur.
- Partisipasi yang berupa tenaga dan pikiran (*physical and psychological participation*). Partisipasi dalam kategori ini biasanya mereka yang menjadi pengurus inti dari KSM. Mereka bertanggung jawab untuk memikirkan teknis pelaksanaan dan sekaligus berkontribusi tenaga. Biasanya hanya terbatas pada beberapa orang saja di kepengurusan KSM. Mereka bekerja dengan didasarkan atas komitmennya membangun masya-

rakat, meskipun harus rela tersita waktu, pikiran dan juga tenaga walaupun tanpa

Untuk kegiatan Lingkungan dan Sosial, Setelah kegiatan selesai, KSM diharuskan melakukan evaluasi partisipatif di tingkat basis (RT/RW). Media ini merupakan forum pertanggungjawaban dan evaluasi KSM/ Panitia kepada masyarakat setempat sekaligus membuat rencana tindak lanjut. Realisasi-nya, sebagian KSM tidak melakukan pertanggungjawaban di tingkat basis. Beberapa temuan lapangan menunjukkan; pertama, KSM hanya memahami setelah pekerjaan selesai, tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan administrasi laporan untuk disampaikan kepada BKM atau konsultan. Kedua, KSM sekedar menjadi syarat administratif untuk mencairkan dana, pelaksana dan pengelola keuangannya dari BKM atau UP. Akibatnya KSM tidak merasa perlu mempertanggungjawabkan kegiatan yang di atas namakan KSM tersebut.

- Evaluasi BLM pertermin di tingkat BKM
Laporan pertanggungjawaban BKM pertermin dilakukan setelah KSM yang mendapatkan alokasi dalam satu termin menyerahkan laporannya. Dalam forum ini mengundang perwakilan masyarakat di tingkat basis (RT/RW), KSM serta kelompok sasaran miskin dan perempuan. Tujuannya adalah menjadi media evaluasi dan pengendalian bersama masyarakat mengenai kegiatan yang telah didanai oleh PNPMM Mandiri Perkotaan di setiap terminnya. Faktanya, tidak semua BKM menjalankan sesuai mekanisme. Bahkan dari semua sampel, tidak ada BKM yang melakukan rebug partisipatif yang merupakan Laporan pertanggungjawaban pertermin. Dengan demikian, pengendalian bertahap yang seharusnya menjadi hak dari masyarakat tidak berjalan.
- Review partisipatif
Di akhir tahun, BKM bertanggung jawab untuk melakukan review partisipatif. Obyek review terdiri dari: pertama, Review kelembagaan, meliputi: penilai-

an terhadap kinerja kelembagaan BKM, termasuk keaktifan Pimpinan, agenda pertemuan rutin; kelengkapan struktur organisasi, Penerapan trans-paransi, akuntabilitas dan demokrasi; kedua, Review program, yang mencakup: evaluasi tentang pelaksanaan program yang telah tertuang dalam rencana tahunan, Mutu produk yang dihasilkan (fisik maupun non fisik), manfaat khususnya terhadap KK miskin; Ketiga, review keuangan BKM, meliputi: Penilaian kinerja keuangan BKM, Penerapan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi dalam pengelolaan dana; dan Pelaksanaan audit keuangan BKM. (Dep. PU, 2010). Review partisipatif yang meliputi tiga komponen di atas dimaksudkan untuk menjadi media kendali masyarakat agar Pimpinan Kolektif BKM senantiasa berada dalam koridor yang benar sesuai dengan harapan masyarakat, baik dari kelembagaan, program maupun keuangannya.

- Evaluasi melalui forum RWT.

Forum partisipatif selanjutnya dalam rangka pengendalian program adalah Rembug Warga Tahunan (RWT). Pelaksanaan kegiatan di akhir tahun sebagai forum pertanggung-jawaban BKM kepada masyarakat sekaligus mengesahkan program-program yang akan dijalankan pada tahun berikutnya. Untuk menjamin legitimasi di masyarakat, peserta yang hadir minimal 2% dari jumlah penduduk dewasa di masing-masing Desa/Kelurahan. Agenda utama RWT adalah Pemaparan hasil review partisipatif oleh Koordinator Tim Review; Laporan Pertanggungjawaban BKM; Penyepakatan Program Kerja BKM; Penyepakatan Rencana Tahunan (Ren-Ta) tahun berikutnya; Perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga jika diperlukan. Praktiknya, semua BKM melaksanakan Rembug Warga Tahunan hanya saja tingkat partisipasi masyarakat tidak semua memenuhi standart minimum (2%).

- Audit Independen masyarakat

Tahapan pengendalian partisipatif yang terakhir adalah audit independen dari masyarakat. Untuk itu, masyarakat kelurahan yang peduli pada PNPMP dapat membentuk Kelompok pemantau independen PNPMP atau sejenisnya. Inisiatif masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan PNPMP harus diakomodasi oleh BKM dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Hasil temuan dari audit independen bisa menyampaikan informasi temuannya kepada rembug-rembug warga kelurahan atau instansi yang berwenang menangani hal tersebut, atau kepada Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang ada. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Audit dan pemantauan independen secara umum belum berjalan. Masyarakat bahkan tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai adanya mekanisme tersebut. Hal ini terjadi di semua lokasi PNPMP Mandiri perkotaan baik Urban maupun Rural. Masyarakat juga belum menunjukkan partisipasinya mengenai pelaksanaan pemantauan independen. Konsultan juga membenarkan bahwa pada tahapan ini memang belum banyak tersampaikan di masyarakat. Dengan kata lain, tidak ada partisipasi masyarakat terkait audit independen pada PNPMP Mandiri Perkotaan.

Berdasarkan pemaparan dari tahapan serangkaian kegiatan saat monitoring dan evaluasi di atas, partisipasi masyarakat secara substansial hanya berjalan pada dua momentum kegiatan, yaitu kegiatan Review partisipatif dan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT). Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut dari sejumlah BKM tidak didasarkan pada kesadaran masyarakat tentang kebutuhan melakukan review maupun RWT, melainkan lebih pada desakan dari tim Konsultan.

Kondisi ini relevan dengan konsep partisipasi Mikkelsen (2006:65) yang membagi

menjadi dua: inisiatif sendiri dan bersifat memaksa. Partisipasi masyarakat pada saat

Tabel 2
Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Korupsi di PNPM Mandiri Perkotaan

Pendekatan Teori	Kategori Partisipasi	Keterangan
1. Tahap Perencanaan.		
Mikkelsen	Bersifat Memaksa	Pemaksaan dari konsultan yg mendampingi.
R. Arstein	Partnership	Relasi Pemerintah dgn masyarakat sdh terjalin secara kemitraan untuk perencanaan pembangunan. Tidak didomi-nasi oleh Pemerintah.
Keit Davis	- Psychological participation; - Physical and psychological participation; - Material participation.	- Partisipasi berupa tenaga - Partisipasi berupa tenaga dan pikiran. - Partisipasi berupa barang
2. Tahap Pelaksanaan.		
- Administratif		
Pretty	Passive Participation	KSM pelaksana tidak berpartisipasi mengerjakan administrasi. Yang mengerjakan BKM (UP) atau konsultan pendamping.
Arstein	Manipulation	
- Pekerjaan lapang.		
Keit Davis	- Physical Participation - Physical and psychological participation; - Material participation; - Money participation.	- Partisipasi berupa tenaga - Partisipasi yang berupa tenaga dan pikiran - Partisipasi berupa barang - Partisipasi berupa Uang
3. Tahap Monitoring & Evaluasi		
Mikkelsen	partisipasi yang bersifat memaksa	Proses kegiatan pada saat monitoring & evaluasi hanya berjalan jika ada dorongan/paksaan dari konsultan pendamping.

Arstein	delegated power	Pemerintah mendelegasikan kekuasaan/ke-wenangan dalam melaksanakan monitoring kegiatan ke masyarakat
Pretty	Participation by consultation.	Dalam setiap tahapan dilakukan melalui kon-sultasi ke konsultan/ fasilitator pendamping.
Keit Davis	physical and psychological participation.	Partisipasi berupa tenaga dan pikiran.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan model partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Korupsi pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dalam tiga tahapan :

Pertama, Partisipasi saat Perencanaan. Rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan meliputi: Sosialisasi awal dan Rembug Kesiapan Masyarakat; Refleksi Kemiskinan; Pemetaan Swadaya; Pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat; Penyusunan PJM pronangkis. Model partisipasinya bersifat memaksa (Mikkelsen); Jika dilihat relasi antara masyarakat dengan Pemerintah masuk kategori partnership participation (Arstein). Bentuknya (Keit Davis) berupa pikiran (psychological participation); tenaga dan pikiran (physical and psychological participation); barang (material participation).

Kedua, Partisipasi saat Pelaksanaan. Secara administratif, termasuk kategori *Passive Participation* (Pretty). Bila dipotret berdasarkan tingkatan partisipasi menurut Arstein, berada pada tingkatan manipulation, artinya belum ada partisipasi masyarakat (nonparticipation). Sedangkan dari sisi pekerjaan, Bentuk partisipasinya (Keit Davis) berupa tenaga (physical Participation); tenaga dan pikiran (physical and psychological participation); barang (material participation); uang (money participation).

Ketiga, Partisipasi saat monitoring dan evaluasi Partisipatif. Terdapat serangkaian tahapan monitoring dan evaluasi internal sebagai upaya penanggulangan korupsi. Hanya saja, yang berjalan hanya pada dua kegiatan; Review Partisipatif; dan Rembug Warga

Tahunan (RWT). Dari dua momentum partisipasi, jika dipotret dengan model partisipasinya Mikkelsen, masuk kategori partisipasi yang bersifat memaksa; jika dilihat dari relasinya dengan pemerintah, maka bisa dipotret menggunakan model partisipasi Arstein, dalam hal ini, tingkat partisipasinya mencapai tingkat pendelegasian kekuasaan (delegated power). Jika dilihat dari model Partisipasinya Pretty, maka partisipasi masyarakat masuk kategori *Participation by consultation*; Tetapi ketika teorinya Keit Davis digunakan untuk memotret, maka masuk kategori partisipasi berupa tenaga dan pikiran (physical and psychological participation).

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. Journal of the American Planning Association, Volume 35, No. 4, Juli 1969. pp. 216-224.
- Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Dedy Mulyana. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press
- Irma Purnamasari, 2008. *Studi Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi*, [Tesis], Semarang, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Joko Subagyo, 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini, 1983. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Edisi Baru. CV. Rajawali Press.
- Keith Davis & John W. Newstrom, 1995. *Perilaku Dalam Organisasi. Edisi Ketujuh*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Pekerjaan Umum, 2010. *Tentang P2KP*. (<http://p2kp.org/aboutdetil.asp?>

- mid=4&catid=2&), [diakses tanggal 22 September 2012].
-, 2010. *Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*, Jakarta.
- Kumoro tomo, Wahyudi. 1992. *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers :
- Mikkelsen, Britha, 2006, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, terjemah, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Melly Septiani (2010). *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan, "Studi kasus di Tlogomas Lowokwaru Kota Malang"*. Muhammad Iqbal. 2007. *Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian, Jurnal Litbang Pertanian, Vol. 26, No. 3, hal. 91-92.*
- Pretty, J. 1995. *Regenerating Agriculture: Policies and practice for sustainability and selfreliance*. Earthscan Publications, London.
- Revida, Erika. (2003), *Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Solusinya*, [diakses 20/2/2012].
- Sastropoetro, Santoso, R.A. 1988, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Sumardjo & Saharudin, 2003. *Metode-metode partisipatif dalam pengembangan masyarakat*. Jurusan ilmu-ilmu sosial ekonomi, Bogor: Fakultas pertanian IPB.
- Sumiyarsono, Elmi, 2010. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih Di Desa Wawosu Dan Desa M a t a i w o i Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara*, [Tesis], Semarang, Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
- Wahyudi, Isa. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi*

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Malang Raya, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/277>, [diakses, tanggal 20/2/2011]

Yoni Yulianti, 2012. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Solok*, [Tesis], Padang, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.

SUPPORT GROUP COUNSELING DAN PENINGKATAN SELF-AWARENESS PADA ORANGTUA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Retna Mariyana Budiarti

Psikolog RS Jiwa Menur Surabaya. Email: retna.mariyan@gmail.com

Lely Ika Mariyati

Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak Padi Bersinar "DINAR"

Telp. 087851141537. email: ikalely14@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research was knowing the influence of support group counseling to increase self awareness of the special needs parents. Analysis technique used quantitative to see the increase the group of self awareness, and used individual analysis to describe the progress of each subject along the intervention. For the fifth parents with special needs children was gotten that support group counseling influence to increase the self awareness of the special needs parents. It was seen from the result of the measurement of self awareness scale was in low grade before the support group counseling process. So the measurement after the intervention was getting the increase of self awareness to the special needs parents.

Keywords: special needs children, self awareness, support group counseling.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *support group counseling* dalam meningkatkan *self awareness* orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Teknik analisa kuantitatif digunakan untuk melihat peningkatan self awareness pada kelompok, sedangkan analisa individu digunakan untuk menggambarkan *progress* masing-masing subyek selama intervensi berlangsung. Pada kelima orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, diperoleh hasil bahwa *support group counseling* berpengaruh untuk meningkatkan *self awareness* para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran skala *self awareness* dengan nilai rendah saat dilakukan sebelum proses *support group counseling*. Kemudian pengukuran dilakukan kembali sesaat setelah intervensi selesai dilakukan diperoleh peningkatan *self awareness* pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Keywords : anak berkebutuhan khusus, *self awareness*, *support group counseling*

PENDAHULUAN

Kehadiran anak merupakan saat yang ditunggu-tunggu dan sangat menggembirakan bagi pasangan suami istri. Kehadirannya bukan saja mempererat tali cinta pasangan suami istri, tetapi juga sebagai penerus generasi yang sangat diharapkan oleh keluarga. Menurut Gargiulo (1985) setiap pasangan memiliki motivasi yang bervariasi untuk memiliki anak, tetapi pada umumnya setiap pasangan mengharapkan untuk memiliki anak sebagai puncak dalam pemenuhan pernikahan mereka.

Setiap orangtua menginginkan anaknya berkembang sempurna. Namun demikian

sering terjadi dimana anak memperlihatkan masalah dalam perkembangan sejak usia dini (Rachmayanti dan Zulkaida, 2007). Salah satu gangguan psikiatrik pada anak dikenal dengan istilah "anak berkebutuhan khusus" (*special needs children*), yaitu anak yang secara bermakna mengalami kelainan/gangguan (fisik, mental-intelektual, sosial, dan emosional) dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya adalah mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus (Direktorat Pembinaan SLB, 2005; Hayden, 2004). Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia terus